

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang besar setelah reformasi pada tahun 1998. Pergolakan massa yang dimotori mahasiswa pada saat itu membuat semuanya berubah<sup>1</sup>. Salah satu kemajuan yang terlihat pada perkembangan partai politik, kebebasan warga Negara berekspresi serta gagasan bahwa rakyat merupakan factor yang perlu diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik. Jatuhnya rezim orde baru bukan saja telah menumbuhkan hasrat para tokoh politik, agamawan, pengusaha, dan kalangan intelektual untuk bangkit menggapai kekuasaan melalui partai politik.

Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara. Dari sisi rekrutmen jabatan politik misalnya, hasil perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002 mengamanatkan, setiap rekrutmen yang dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan (eksekutif), perwakilan (legeslatif), dan peradilan (yudikatif) baik di tingkat pusat maupun daerah mekanismenya harus melalui partai politik. Amanat konstitusi ini menunjukkan bahwa fungsi dan keberadaan partai politik menjadi sangat penting dalam relasi pengisian pos-pos kenegaraan melalui mekanisme

---

<sup>1</sup> Khoirun. 2014. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.7

politik yang demokratis. Banyak kalangan berpendapat bahwa partai politik yang sebetulnya menentukan demokrasi.

Artinya, semakin tinggi peran dan fungsi partai politik, akan semakin berkualitas system demokrasi yang ada. Menurut Clinton Rossiter menyatakan bahwa tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai<sup>2</sup>. Partai politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum<sup>3</sup>.

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Partai politik merupakan unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintah, di sisi lain partai politik juga menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Secara garis besar peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, peran dan fungsi internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga mengembangkan tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi, disini peran dan fungsi partai politik terkait dengan masyarakat

---

<sup>2</sup> S. Katz dan William Crotty. 2014. *Handbook. Partai Politik*. Bandung: Nusamedia. Hlm.7

<sup>3</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (PT. Grasindo. Jakarta, 2010), hlm. 149.

luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik<sup>4</sup>.

Secara umum partai politik memiliki fungsi, antara lain adalah agar dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan di hadapan masyarakat. Partai politik sebagai bagian dari infrastruktur politik menjalankan beberapa fungsi, salah satunya adalah kaderisasi politik. Kaderisasi adalah pendidikan jangka panjang untuk menanamkan nilai-nilai tertentu kepada seorang kader. Kader adalah anggota, penerus organisasi. Kader harus meyakini nilai-nilai bersama sebagai pembentuk watak dan karakter organisasi. Organisasi, apapun itu mutlak mensyaratkan kaderisasi, terlebih lagi bagi partai politik.

Setiap partai akan mengambil keputusan, pada saat menjelang pemilihan kepala daerah, ini menunjukkan eksistensi partai politik yang merupakan bagian dari demokrasi. Jauh hari sebelum tahapan (Pemilukada), partai politik membuka penjangkaran calon, baik dari internal partai atau dari luar partai untuk calon Gubernur/Wakil Gubernur, calon Bupati/Wakil Bupati dan calon Walikota/Wakil Walikota<sup>5</sup>. Proses rekrutmen merupakan hal yang fundamental untuk mempertahankan eksistensi sebuah partai politik. Kaderisasi ini menciptakan sebuah regenerasi organisasi dengan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.117.

<sup>5</sup> Valina Singka Subekti, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dasri Ide Pembaruan Sistem Politik Hingga Ke Praktik Pemerintah Demokrasi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan, pengetahuan dan wawasan tentang kepemimpinan dan manajemen.

Hal ini menjadi penting bagi sebuah organisasi, karena merupakan inti dari kelanjutan perjuangan organisasi kedepan. Tanpa kaderisasi, rasanya sangat sulit dibayangkan sebuah organisasi dapat bergerak dan melakukan tugas-tugas keorganisasiannya dengan baik dan dinamis. Fungsi dari rekrutmen tersebut ialah mempersiapkan calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Kader suatu organisasi adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu untuk bersaing memperebutkan jabatan-jabatan publik melalui mekanisme pemilu. Kaderisasi ini sangat penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan (*knowledge*) politik, tidak hanya terkait dengan sejarah, misi, visi dan strategi partai politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan bangsa dan Negara.

Dalam proses rekrutmen juga dapat dilakukan transfer keterampilan dan keahlian berpolitik. Oleh karena itu, dengan adanya proses rekrutmen, peningkatan kualitas kepemimpinan akan memberikan hal yang positif dalam menciptakan pemimpin baru bagi organisasi. Proses rekrutmen sebagai tempat untuk menciptakan pemimpin baru yang memiliki kualitas untuk menjalankan organisasi agar dapat terus maju dan berkembang<sup>6</sup>. Hal tersebut perlu disertai dengan sistem transparan yang memberikan jaminan akses kepada semua kader yang memiliki potensi. Perlu juga dimunculkan sistem persaingan

---

<sup>6</sup> Insan Harapan Harahap, *Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional* (Jakarta:Universitas Bakrie, 2017)

yang sehat dan transparan dalam tubuh organisasi partai politik. Kader dan calon pemimpin harus dibiasakan dengan sistem persaingan yang sehat dan transparan, hal tersebut dikarenakan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa “ Proses rekrutmen partai politik harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART serta perundangundangan yang berlaku”.

Namun pada kenyataannya, di Provinsi Jambi banyak partai-partai besar yang dianggap gagal dalam proses kaderisasinya, salah satu indikasinya adalah adanya kader partai yang loncat ke partai lainnya atau mengundurkan diri dari keanggotan partai. Salah satu contohnya adalah mantan istri Gubernur dua priode Provinsi Jambi priode 1999-2004 dan 2005-2010 H. Zulkifli Nurdin (almarhum) yaitu Ratu Munawaroh, calon wakil gubernur yang sebelumnya adalah kader Partai Amanat Nasional dan kini berpindah ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpasangan dengan Cek Endra yang merupakan ketua DPW partai GOLKAR Provinsi Jambi.

Pada tahun 2020 adanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Pemilihan kepala daerah tersebut digelar di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota, salah satunya

adalah Provinsi Jambi. Pada tahun 2020, tercatat kurang lebih 2.415.862 pemilih di Provinsi Jambi<sup>7</sup>.

Jika melihat pilkada serentak 2015 di Jambi, baik ditingkat Provinsi dan lima Kabupaten/Kota, tidak ada satupun partai yang bisa mengusung calonnya sendiri karena terhambat *parliamentary threshold* menuntut 20% jumlah kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu artinya partai yang ada harus berkoalisi untuk memenuhi syarat minimal pencalonan. Partai politik mengandalkan jasa survei sehingga hanya calon dengan popularitas dan elektabilitas tinggi saja yang menjadi patokan partai dalam menentukan pasangan calon. Hilangnya aturan untuk menghambat peluang munculnya dinasti politik dalam regulasi juga semakin menambah eksklusivitas dari sirkulasi elit politik lokal.<sup>8</sup>

**Tabel 1**  
**Hasil Pemilu Legislatif Provinsi Jambi Tahun 2019**

No.	Partai Politik	Perolehan Kursi
1	PDIP	Sembilan (9)
2	Gerindra	Tujuh (7)
3	Golkar	Tujuh (7)
4	Demokrat	Tujuh (7)
5	PAN	Tujuh (7)

<sup>7</sup>Berita Satu"Meski Unggul di Surve Pilkada Jambi, Parpol Tak Minat Dukung Syari Fasha" <https://www.beritasatu.com/nasional/669379> Di akses pada tanggal 25 Desember Pukul 15:35

<sup>8</sup>Mochammad Farisi, "Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Instrumen Sirkulasi Elit Politik Lokal: Studi di Provinsi Jambi Tahun 2015".( Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 2 No. 2, Juli 2016) hlm. 235

6	PKB	Lima (5)
7	PKS	Lima (5)
8	PPP	Tiga (3)
9	Nasdem	Dua (2)
10	Hanura	Dua (2)
11	Berkarya	Satu (1)
Jumlah Kursi		55

*Sumber: Gatra*

Menjelang perhelatan pemilihan Gubernur Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada Desember 2020, banyak calon kandidat yang berbondong-bondong membangun komunikasi politik dan merapat ke beberapa partai politik, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemilik 9 kursi di DPRD Provinsi Jambi sangat diperebutkan, pasalnya partai pemenang pada pemilihan legislatif 2019 di Provinsi Jambi ini memiliki dua kader yang akan maju pada pilkada serentak Provinsi Jambi tahun 2020, yakni Bupati Tanjung Jabung Barat, Safrial yang sempat dikabarkan menjadi pendamping Fachrori Umar dan mantan wakil wali kota Jambi, Abdullah Sani yang sudah dipastikan mendampingi Al Haris. Namun sayangnya, sebagai kader murni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kedua bakal calon wakil gubernur pada pilkada serentak Provinsi Jambi 2020 tersebut tidak mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, melainkan Ratu Munawaroh yang diketahui sebelumnya merupakan kader Partai Amanat Nasional yang mendapatkan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Bupati Tanjung Jabung Barat, H. Safrial yang sebelumnya sempat di gandang-gandang bakal mendampingi H. Fachrori Umar sebagai calon wakil gubernur Provinsi Jambi mengurungkan niat nya tersebut karena salah faktor nya adalah tidak mendapatkan dukungan dari partai asalnya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berbeda dengan H. Safrial, satu hari pasca diumumkan nya dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di pilgub Jambi tahun 2020, bakal calon wakil gubernur Jambi Abdullah Sani yang semula merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengundurkan diri. Berkas pengunduran diri diantar langsung oleh Abdullah Sani ke kantor DPD PDIP Jambi<sup>9</sup>.

Semua dinamika ini tidak lain juga merupakan akibat dari sistem rekrutmen partai yang kurang efektif. Karena ketika kaderisasi partai politik gagal, maka yang akan terjadi adalah nilai-nilai politik tidak sampai pada generasi berikutnya. Oleh karena itu agar rekrutmen partai politik dapat berjalan dengan baik, maka anggota partai politik harus memiliki pemahaman yang utuh terhadap visi dan misi partai yang dianutnya, adanya konsolidasi dan management yang baik dari internal partai politik. Dalam perjalanan organisasi kualitas seorang kader akan diuji oleh komitmennya, seberapa lama ia mampu bertahan, dan memberikan yang terbaik. Atau istilah biologisnya seleksi alam, *survival of the fittest*.

Oleh karena itu, sistem rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan

---

<sup>9</sup><https://www.jambi-independent.co.id/read/2020/08/29/54459/abdullah-sani-mundur-dari-pdip> Diakses pada 11 Februari 2021 pukul 15:35

orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas kaderisasi politik. Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi terpenting yang dimiliki partai politik adalah fungsi kaderisasi politik.

Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini yaitu, pertama oleh Surya Hidayat Bokings tahun 2018, dengan Judul “Implementasi Pola Rekrutmen Politik dalam Perspektif Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam sistem rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik mengalami turbulensi dan kelemahan UU Partai Politik yang membuka ruang bebas kepada pengurus pusat untuk bisa menganulir keputusan pengurus daerah perlu diperbaharui kembali<sup>10</sup>.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Yuni Femelia pada tahun 2017 dengan judul “Pola Pengkaderan PKB Dalam Meningkatkan Kualitas Berpolitik (Study Pada DPC PKB Kota Bandar Lampung)” penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan memfokuskan pada gambaran secara

---

<sup>10</sup> Surya Hidayat Bokings, *“Implementasi Pola Rekrutmen Politik dalam Perspektif Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik”* Skripsi program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo. Tahun 2019 Diakses pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 19:55

jelas dengan factual mengenai pola pengkaderan PKB dalam merekrut kader-kader mereka<sup>11</sup>.

Perbedaan kedua penelitian tersebut yakni, pada penelitian pertama menjelaskan bagaimana implementasi pola rekrutmen partai politik secara umum dalam perspektif pasal 29 Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Pada penelitian kedua meneliti pola pengkaderan Partai Kebangkitan Bangsa dalam meningkatkan kualitas berpolitik. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan, memfokuskan bagaimana pola kaderisasi calon Gubernur Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Berdasarkan urgensitas yang ada di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"SISTEM REKRUTMEN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM MENENTUKAN CALON GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah untuk penulis melakukan penelitian. Adapun rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Yuni Femelia, *"Pola Pengkaderan PKB Dalam Meningkatkan Kualitas Berpolitik (Study Pada DPC PKB Kota Bandar Lampung)"* Skripsi Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuludin Universitas Negeri Raden Intan, Lampung. Tahun 2017 Diakses pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 20:50

1. Bagaimana sistem rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menentukan calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020?
2. Apa pertimbangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam mengusung Ratu Munawarah pada pilkada serentak di Provinsi Jambi tahun 2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menentukan calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam mengusung Ratu Munawarah pada pilkada serentak di Provinsi Jambi tahun 2020.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat:

a) Teoritis

1. Sebagai bahan untuk memperluas ilmu pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama masa perkuliahan yang jika dibandingkan dengan penerapannya secara nyata
2. Memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pola kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan indikator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam mengusung Ratu Munawarah pada pilkada serentak di Provinsi Jambi tahun 2020

b) Praktis

1. Manfaat bagi peneliti adalah menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pola kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menentukan calon gubernur Provinsi Jambi pada pilkada serentak tahun 2020 dan indikator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam mengusung Ratu Munawarah pada pilkada serentak di Provinsi Jambi tahun 2020
2. Manfaat bagi masyarakat adalah agar dapat mengetahui proses politik menjelang pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi.

## **1.5 Landasan Teori**

### **1.5.1 Teori Partai Politik**

Teori partai politik menurut Miriam Budiardjo merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah

untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebutkan kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya<sup>12</sup>.

Partai politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat. Partai politik pertama kali lahir di Negara-Negara Eropa Barat, dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam partai politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Seiring berjalannya waktu, partai politik tersebut disebabkan oleh perkembangan demokrasi di berbagai negara di dunia<sup>13</sup>.

Secara umum partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Fungsi utama dari partai politik ini sendiri adalah untuk mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut partai politik melakukan tiga hal yang umum dilakukan oleh partai politik yaitu menyeleksi calon-calon, setelah calon-calon partai terpilih selanjutnya ialah melakukan kampanye, setelah kampanye dilaksanakan dan calon terpilih dalam

---

<sup>12</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 403-404.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm.397.

pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan oleh partai ialah melaksanakan fungsi pemerintahan baik legislatif ataupun eksekutif<sup>14</sup>.

Secara lebih rinci Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa fungsi partai politik adalah:

a. Sarana Komunikasi Politik

Partai politik berfungsi sebagai komunikator sekaligus komunikasi politik yang menyampaikan segala informasi tidak hanya dari pemerintah yang terkait regulasi, keputusan-keputusan, dan kebijaksanaan, tetapi juga aspirasi yang mereka tampung dari masyarakat. Kedudukan partai politik menjadi suatu komponen penting dalam system politik.

b. Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenal nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan "budaya politik" yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian

---

<sup>14</sup>Labolo Muhadam & Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis* (Jakarta : PT.RajaGrafindo persada, 2015), hlm.15

sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa.

c. Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun kepentingan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk menajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

d. Sarana Pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada disetiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, maupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Disini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin<sup>15</sup>.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa partai politik dapat menjadi penghitung psikologis dan organisasional antara warga

---

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo. *Op.cit.*, hlm 405.

Negara dengan pemerintahannya. Selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat.<sup>16</sup>

### 1.5.2 Pola Rekrutmen

Pola adalah system kerja atau prosedur cara kerja yang terdiri dari unsur-unsur terhadap suatu perilaku dan dapat dipakai sebagai pedoman, serta Rekrutmen/penarikan adalah salah satu fungsi operasional manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi jabatan/pekerjaan tertentu dalam organisasi atau perusahaan. Menurut Sadilil Samsudin, rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dalam maupun luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya promosi adalah kesempatan seseorang dalam menaikan posisi jabatannya yang berarti dari suatu jabatan ke jabatan yang lain, yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi<sup>17</sup>.

Menurut Gabriel Almond bahwa proses rekrutmen merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu,

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 409.

<sup>17</sup> Supomo R dan Nurhayati Eti, *Mnagemen Sumber Daya Manusia* (Bandung ; PT. Yrama Widya), hlm.45

pendidikan, dan latihan<sup>18</sup>. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam berpolitik, organisasi partai politik tidak digerakan oleh mesin dan teknologi, tetapi oleh manusia. Dengan demikian cara organisasi partai politik dalam mendapatkan manusia yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi merupakan tantangan utama dalam hal memanaganemen organisasi partai politik.

Terlebih saat akan menjelang pemilihan umum, masing-masing partai politik mencoba mencari dan mengusung individu yang memiliki integriras tinggi sebagai calon legislative dan eksekutif<sup>19</sup>. Rekrutmen politik menurut Ramlan Subakti, rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dalam pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi<sup>20</sup>.

Pada umumnya proses rekrutmen politik dapat dilakukan dengan beberapa cara atau sifat, yaitu :

---

<sup>18</sup> Muhamadan Labolo dan Teguh Ilham, *Op.cit. hlm.17*.

<sup>19</sup> Almond, *Studi Perbandingan Sistem Politik*, dalam Mochtar Mas'ud dan Colin Mac Andrews (Eds), *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978), hlm.29.

<sup>20</sup> Ramlan Subakti, *Memahami ilmu politik*, (PT, Grasindo. Jakarta, 2010) hlm.150

a. Sistem Rekrutmen Politik Terbuka

Sistem rekrutmen terbuka mengandung makna bahwa semua warga Negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta mempunyai bakat, tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Kelebihan dari sistem ini yaitu menerima pluralism, non-sektarian, non-diskriminatif, dan inklusif. Sedangkan kekurangannya yaitu mementingkan kuantitas dibanding kualitas dan jumlah anggota yang relatif banyak

b. Sistem Rekrutmen Politik Tertutup

Sebaliknya sistem rekrutmen tertutup hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti kawan-kawan akrab, pengusaha, atau individu-individu yang mempunyai persamaan agama, daerah, etnis, bahkan keluarga dari pihak penguasa. Kelebihan dari rekrutmen tertutup yaitu jumlah anggota relatif terbatas, direkrut secara kooptasi, serta kekuatan bersumber pada kualitas. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak menerima pluralism, sectarian, diskriminatif, eksklusif, serta cenderung pada krisis kader<sup>21</sup>.

Jadi dapat dikatakan bahwa rekrutmen politik adalah proses individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-

---

<sup>21</sup><http://www.academia.edu/identifikasi-kelebihan-dan-kekurangan-open-recruitment-dan-close-rekrutment-partai-politik-di-indonesia>. diakses pada 6 Februari 2020, pukul 08.30 wib.

peran politik aktif, dimana partai politik dalam melakukan seleksi dalam menetapkan bakal calon yang akan diusung hendaklah kader yang benar-benar aktif, baik itu didalam kemasyarakatan maupun internal partai. Bukan kader yang muncul ketika sewaktu pelaksanaan pemilihan umum, tentunya dalam hal ini pengurus partai politik harus benar-benar selektif dalam menentukan calon yang akan diusung, calon yang dimaksudkan disini calon yang benar-benar memperhatikan masyarakat, dekat dengan masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga bias meningkatkan citra partai.

Jika partai gagal melakukan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik. Rekrutmen politik merupakan fungsi untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu. Kecenderungan yang digunakan dalam proses rekrutmen politik:

1. Partisipan. pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai.
2. *Compartmentalization*. Proses rekrutmen yang di dasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang.

3. *Immediate Survival*. Dimana proses rekrutmen dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan-kemampuan orang-orang yang direkrut.
4. *Civil Service Reform*. Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bias mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting contoh non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai<sup>22</sup>.

Sistem rekrutmen politik secara empiris terdiri dari beberapa cara yaitu sebagai berikut:

1. Seleksi pemilihan melalui ujian.
2. Latihan (training), Kedua hal tersebut menjadi indikator utama di dalam perekrutan politik.
3. Penyortiran atau penarikan undian (cara tertua yang di gunakan di Yunani kuno).
4. Rotasi memiliki tujuan mencegah terjadinya dominasi jabatan dari kelompok-kelompok yang berkuasa maka perlu adanya pergantian secara periode dalam jabatan politik.
5. Perebutan kekuasaan dengan menggunakan atau mengancam dengan kekerasan. Cara ini tidak patut dicontoh karena untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah harus melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji karena kita telah dididik dengan baik dan

---

<sup>22</sup> Syamsuddin Haris, *Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki* ( Jakarta : PT Gramedia, 2005) hlm. 180

harus menerapkan teknik-teknik yang baik pula dalam berpolitik.

6. Petronage artinya suatu jabatan dapat dibeli dengan mudah melalui relasi-relasi terdekat. Petronage masih memiliki keterkaitannya dengan budaya korupsi.
7. Koopsi (pemilihan anggota-anggota baru) artinya memasukan orang-orang atau anggota baru untuk menciptakan pemikiran yang baru sehingga membawa suatu partai pada visi dan misi yang ditujunya<sup>23</sup>.

Rekrutmen politik memiliki suatu pola-pola dalam konsepnya. Apabila mengkaji pola-pola tersebut akan diketahui bahwa sistem nilai, perbedaan derajat, serta basis dan stratifikasi sosial terkandung didalam rekrutmen politik. Hal ini berarti rekrutmen politik mampu membangkitkan gap-gap di dalam masyarakat dalam tingkatan-tingkatan peran masyarakat. Gap-gap ini berpengaruh besar dalam hubungan antar masyarakat.

Pola-pola rekrutmen politik ini secara tidak disengaja menjadi indikator yang cukup penting untuk melihat pembangunan dan perubahan suatu negara. Di dalam pola-pola ini memiliki keterkaitan antara rekrutmen dan perekonomian suatu negara mampu mengkaji pergeseran ekonomi masyarakat, infrastruktur politik, serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat, artinya

---

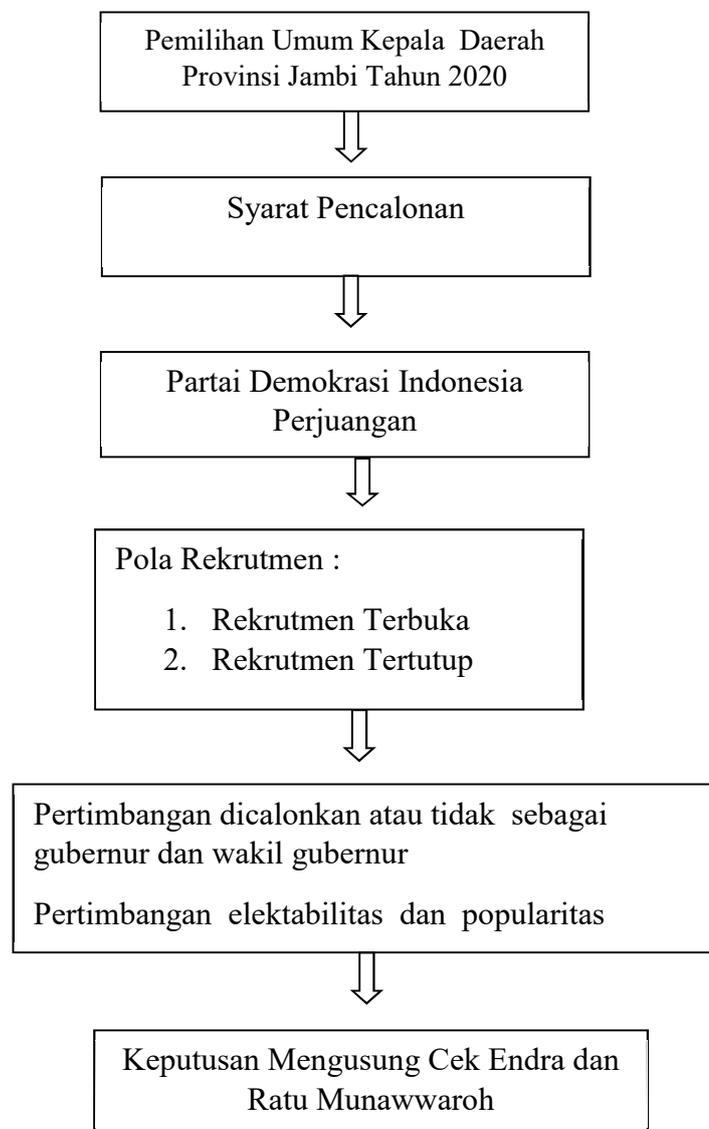
<sup>23</sup> Allan Yanika, *Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional Provinsi Riau. Jom FISIP Vol. 1 no. 2 Oktober 2014.* hlm. 6.

pemimpin-pemimpin yang baru akan membentuk kebijakan-kebijakan terbarunya yang mengarah demi kemajuan negaranya serta faktor politik menciptakan terjadinya iklim politik yang cukup mempengaruhi pergerakan ekonomi suatu negara didalamnya.

## 1.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena lebih mencakup tujuan dari peneliti itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pola kardenisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam mennetukan calon Gubernur Provinsi Jambi pada pilkada serentak tahun 2020.

**Gambar 1**



## 1.7 Metode Penelitian

Penelitian ialah suatu proses dari penelitian yang muncul dari niat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari niat tersebut dilakukanlah dengan metode penelitian yang cocok dengan penelitian. Metode penelitian merupakan suatu proses penelitian atau sebuah pemahaman yang didasari oleh metodologi yang menyelidiki suatu permasalahan atau fenomena sosial<sup>24</sup>.

Pendekatan dalam metode ini menggunakan pendekatan kualitatif. Digunakannya pendekatan kualitatif karena teknik pengumpulan data ini lebih cepat digunakan untuk wawancara dari atas kebawah sehingga sulit untuk teknik kuantitatif, dengan penelitian kualitatif akan diketahui dengan cara mendalam jika dengan kuantitatif sulit untuk bisa diketahui dengan mendalam<sup>25</sup>.

### 1.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan jika dilihat dari objeknya sangat luas, namun karena adanya lokasi yang mudah dijangkau, maka peneliti memfokuskan penelitian ini di Kota Jambi tepatnya di kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, adapun pertimbangan memilih lokasi ini karena permasalahan yang dirasa sudah sangat penting untuk diteliti.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung: ALFABETA,2012), hlm. 3.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 8-9.

### 1.7.2 Fokus dan Dimensi Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki jangkauan luas, maka diperlukan batasan masalah yang disebut fokus. Penentuan fokus didasarkan dengan tingkat kebaruan formasi yang diperoleh dari situasi lapangan<sup>26</sup>. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka fokus penelitian ini adalah menganalisis pola kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menentukan calon Gubernur Provinsi Jambi pada pilkada serentak tahun 2020. Maka Dimensi dari penelitian ini meliputi mekanisme kaderisasi yang bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi proses kaderisasi yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menentukan calon Gubernur Provinsi Jambi pada pilkada serentak tahun 2020.

### 1.7.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya<sup>27</sup>. Karena berkaitan dengan pola kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calon Gubernur Provinsi Jambi dalam Pilkada serentak tahun

---

<sup>26</sup> Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif IPS*, (Bandung:PT Remaja Rosda, Cetakan Pertama, 2013), hlm. 63.

<sup>27</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 16.

2020, tentunya informan yang dipilih adalah pelaku dari partai politik dan calon Gubernur.

Data primer dari penelitian ini akan diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan. Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara, akan dianalisis menjadi sebuah data pokok untuk digunakan dalam menyelesaikan penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data<sup>28</sup>. Informasi berupa teori atau konsep ilmiah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan penelitian. Selain itu, peneliti memperoleh informasi dari buku – buku, jurnal, dokumen yang diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung dan media berita berkaitan dengan sosial, politik, demokrasi, pemilu, dan hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian. Data ini nantinya digunakan untuk mendukung informasi data primer.

#### 1.7.4 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberika informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang permasalahan yang akan diteliti dan merupakan orang

---

<sup>28</sup> *Ibid* hlm.18.

yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti<sup>29</sup>. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

a. *Purposive sampling*

*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan<sup>30</sup>. Pertimbangan yang dimaksud adalah memilih informan yang mengetahui tentang objek dari penelitian. Objek penelitian ini adalah pola kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menentukan calon Gubernur Provinsi Jambi pada pilkada serentak tahun 2020, sehingga yang menjadi informan adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta calon Gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Berdasarkan kedua teknik tersebut, maka informan yang dianggap penting oleh peneliti sebagai sumber data untuk mengetahui pola kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menentukan calon Gubernur Provinsi Jambi pada Pilkada serentak tahun 2020 adalah :

---

<sup>29</sup> Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 163.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 300.

**Tabel 2**  
**Daftar informan utama penelitian**

No.	Nama	Keterangan
1,	Edi Purwanto, S.H.I., M.Si.	-Ketua DPD PDI Perjuangan 2019-2024  -ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024  -Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2014-1019  -Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi periode 2005-2008
2.	M. Asriadi, ST.	- Wakil ketua bidang kaderisasi dan ideologi  -Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019
3.	Heriyono, SE.	-pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi
4.	Dr. H. Pahrudin HM, S.S., M.A	-Akademisi  -Pengamat Politik
5.	Dori Efendi, S.IP., M.Soc., Ph.D	-Akademisi  -Pengamat Politik

### 1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan metode wawancara ini terbagi menjadi dua jenis yaitu, wawancara terstruktur dalam mengumpulkan data penelitian. yang bisa dipergunakan terstruktur yang mana keduanya dapat digunakan sesuai dengan keadaan penelitian<sup>31</sup>.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini merupakan wawancara secara tidak terstruktur atau terbuka. Maksudnya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun melainkan hanya berupa pertanyaan secara garis-garis besar permasalahan.

#### 2. Dokumentasi

Selain wawancara, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat cendramata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat

---

<sup>31</sup> Prof. Dr.A. Muri Yusuf, M.Pd. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian gabungan*”, Edisi Pertama, (Jakarta :Kencana 2014) hlm. 380.

data-data yang sudah ada<sup>32</sup>. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk mengali informasi yang terjadi dimasa lampau secara historis.

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh catatan peristiwa yang telah berlalu sebagai bahan simpanan apabila dibutuhkan. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian. Seperti laporan-laporan, foto-foto serta rekaman suara masing-masing informan yang telah ditentukan.

#### 1.7.6 Teknik Analisis Data

Model analisis data kualitatif ini terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi data. Adapun penjelsannya adalah sebagai berikut :

##### a. Reduksi data

Mereduksi data sama hal dengan kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok yang menjadi fokusnya, mencari tema dan polanya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Kegiatan mereduksi data dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup>Iriyana dan Risti Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, (Sorong : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2018 <https://ofs.io/cy9de/download/formatpdf>, Diakses Pada tanggal 4 Februari 2020 Pukul 13.45 WIB

<sup>33</sup> Sugiyono, *Opcit*, hlm. 247.

## b. Penyajian Data

Penyajian data, peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan kategori. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan pekerjaan selanjutnya<sup>34</sup>.

Cara yang dipilih oleh peneliti dalam menyajikan data adalah dengan menggunakan bagan dan teks naratif. Menggunakan bagan dapat memperjelas pola data-data yang diperoleh baik primer maupun skunder. Sementara teks naratif digunakan untuk penggambaran singkat mengenai bentuk bagan yang telah dibuat.

## c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum turun kelapangan. Kesimpulan awal ini bersifat sementara, dan akan berubah apabila pada saat turun kelapangan tidak mendapatkan bukti-bukti yang mendukung data sebelumnya. disinilah diperlukan verifikasi setelah penarikan kesimpulan. Tujuannya adalah untuk memperkuat data sebelumnya dan dapat membuktikan kebenaran dari penarikan kesimpulan data sehingga lebih kredibel<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 249.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 252.

### 1.7.7 Triangulasi Data

Triangulasi diartikan sebagai pengujian data yang bersipat mengabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaigus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data<sup>36</sup>. Teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti ada triangulasi data, yaitu penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data, peneliti akan menganalisis beragam data primer maupun skunder untuk mendapatkan hasil yang valid dan kridibel.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 241.